

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**DINAS PMD**

**DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap public dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, 22 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas PMD

Kabupaten Rote Ndao



**Pauwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018

## IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = $\frac{5}{4} \times 100$	7
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Masyarakat	<b>Indeks Desa Membangun</b>	poin	0,65	0,64	98,04	Sangat Tinggi
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan</b>				<b>98,04</b>	Sangat Tinggi
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa maju dan Berkembang	%	74,50	75,00	100,67	Sangat Tinggi
	Realisasi APBDes	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Bumdes Berkembang	%	28,57	23,76	83,16	Tinggi
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran</b>				<b>94,61</b>	Sangat Tinggi
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA</b>					<b>95,47</b>	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **95,47%** atau dikategorikan "**Sangat Tinggi**", dengan rata-rata capaian yaitu:

- 1) Capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Pembedayaan dan Masyarakat** sebesar **98,04%** atau dikategorikan "**Sangat Tinggi**"; dan
- 2) Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa** sebesar **94,61%** atau dikategorikan "**Sangat Tinggi**";

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**" melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Msyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya Sistim dan Mekanisme Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Adanya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
- 5) Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang rendah.
- 2) Kesejahteraan Aparatur yang rendah.
- 3) Kelembagaan Usaha Ekonomi masyarakat yang belum berfungsi dengan baik serta sumberdaya pelaku ekonomi yang rendah.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa.
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
- 3) Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.**2.934.714.234,-** (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.**2.846.690.586,-** (*Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar **97,00%**. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar **Rp.88.023.648,-** (*Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar **3,00%** atau dikategorikan **Efisien**. Dengan capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** sebesar **98,04%** terhadap realisasi anggaran **97,00%** menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar **1,01%** atau berada pada nilai rasio  $\geq 1$  sehingga dikategorikan **Efektif** dan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** sebesar **96,41%** terhadap realisasi anggaran **97,00%** menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar **0,98%** atau berada pada nilai rasio  $\geq 1$  sehingga dikategorikan **Kurang Efektif**.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 22 Januari 2025

  
Plt. Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Rote Ndao  
**Pauwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19810725 200604 1 018

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Iktisar Eksekutif</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum .....	3
D. Dasar Hukum .....	17
E. Sistematika Pelaporan .....	18
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>21</b>
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 .....	21
B. Indikator Kinerja Utama .....	27
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 .....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>30</b>
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	30
B. Capaian Kinerja .....	33
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	36
D. Kinerja Keuangan .....	59
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	<b>68</b>
1. FORMAT VERIVIKASI LEVEL 1 LKIP TAHUN 2024	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	
4. POHON KINERJA TAHUN 2024	
5. RENCANA AKSI TAHUN 2024	
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024	
7. SOP PENYUSUNAN LKIP	
8. SK TIM PENYUSUNAN LKIP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin .....	10
Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	10
Tabel 1.3. Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil .....	11
Tabel 1.4. Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya .....	13
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) .....	28
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 .....	29
Tabel 3.1. Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja .....	32
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 .....	33
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	35
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	36
Tabel 3.4. Rekapitulasi IDM Periode 2023-2024.....	37
Tabel 3.5. Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	42
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja sasaran terwujudnya pemberdayaan Masyarakat dan desa .....	43
Tabel 3.7. Rekapitulasi IDM .....	43
Tabel 3.10. Realisasi Pelaksanaan APBDes .....	48
Tabel 3.11. Daftar Nama Bumdes .....	54
Tabel 3.12. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Desa .....	59
Tabel 3.13. Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao .....	60
Tabel 3.14. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran terhadap capaian kinerja indicator Dinas PMD.....	64

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao ..... 9

Gambar 3.2. Grafik Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ..... 34

Gambar 3.3. Tingkat Capaian Indikator Kinerja ..... 35

Gambar 3.3. Tren 1 Tahun Indeks Desa Membangun ..... 40

Gambar 3.7. Tren Persentase Realisasi APBDes ..... 53

Gambar 3.8. Tren Persentase Bumdes Berkembang ..... 57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan

strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### C. Gambaran Umum

#### **Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao**

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, ditetapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok: **“Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa
- c. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati
- b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, mempunyai Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Struktur Dinas Pemberdayaan dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu Sekretaris dan 4 Bidang yakni Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosialisasi Dasar, Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bidang Pendayagunaan SDA dan TTG, Bidang Bina dan Kelurahan.

### **2. Sekretaris**

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

### **3. Bidang PMD dan PSD**

Bidang PMD dan PSD, membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu :

- a. Kepala Seksi Peningkatan Motivasi Masyarakat dan Gotong Royong
- b. Kepala Seksi Pembangunan Lembaga Kemasyarakatan
- c. Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan

### **4. Bidang UED dan PKP**

Bidang Ued dan PKP, Membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu :

- a. Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa dan Permodalan Desa
- b. Kepala Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Pedagangan Desa
- c. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan

### **5. Bidang Pendayagunaan SDA dan TTG**

Bidang SDA dan TTG, Membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu :

- a. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pendayagunaan TTG
- b. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa

## **6. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- a. Kepala Seksi Penataan, Administrasi dan Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa
- b. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemrintah Desa

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut **Kepala Dinas** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pengoordinasian kebijakan di Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan , Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan di Sekretariat, Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan
- d. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### **1. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. perencanaan kebijakan operasional di Sekretariat;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

## **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar.**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Peningkatan Motivasi Masyarakat dan Gotong Royong, Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Seksi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar;

- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Usaha Ekonomi Desa dan Permodalan Desa, Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Perdagangan Desa, Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan rencana program Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan operasional Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **5. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan, Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa, Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, Seksi Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan operasional Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

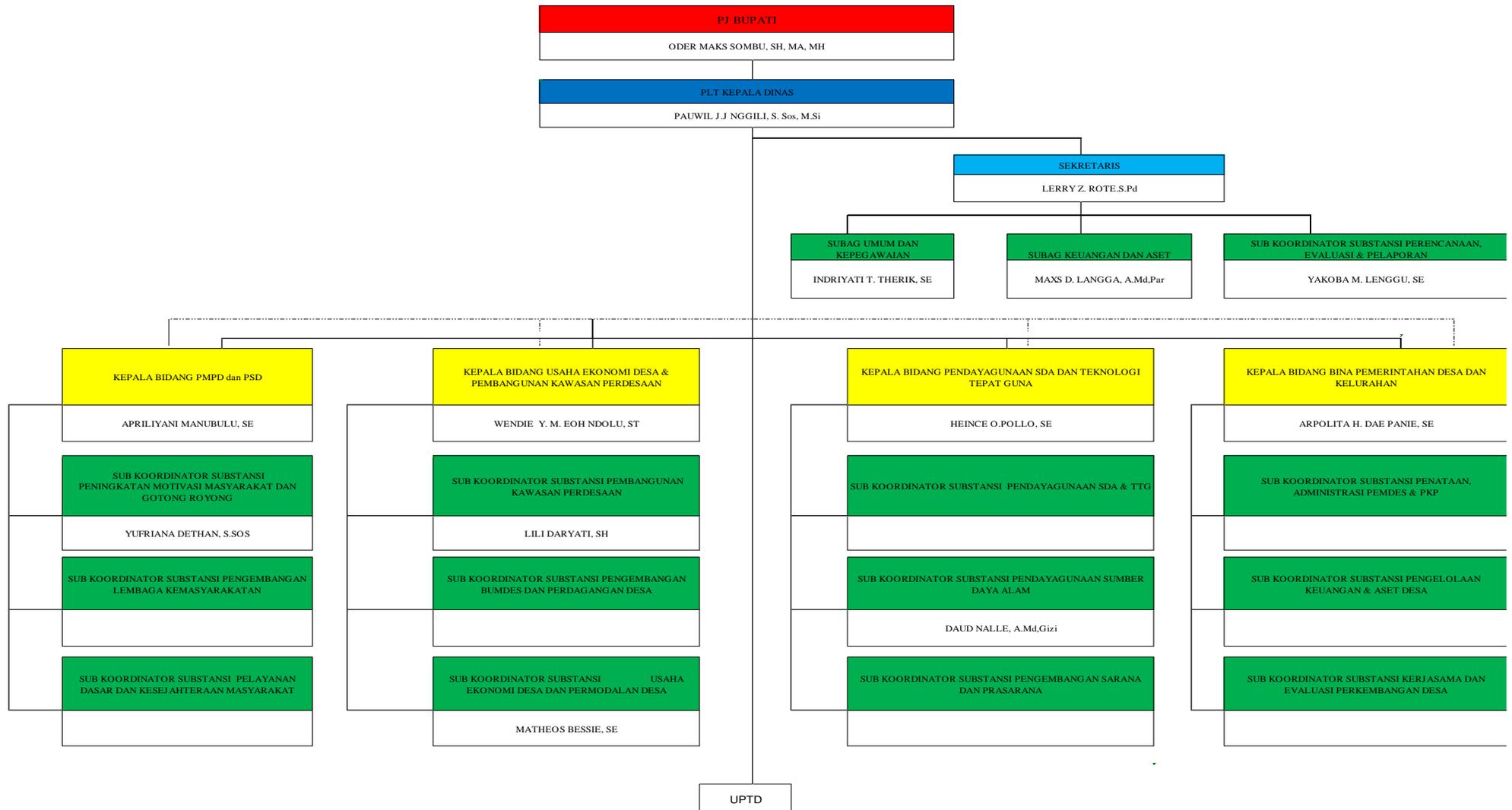
### **Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka struktur organisasi Tahun 2024 seperti gambar berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024



Keterangan :  
 — : Garis Komando  
 - - - : Garis Koordinator

## 1. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 25 (dua puluh lima ) orang yang terdiri dari 21 (Dua Pulu Satu) orang laki-laki dan 8 (Delapan) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk I	1	-	1
2	IV/a	Pembina	1	-	1
<i>Jumlah Golongan IV</i>			<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>
3	III/d	Penata Tk.I	1	5	5
4	III/c	Penata	3	1	4
5	III/b	Penata Muda Tk.I	4	-	4
6	III/a	Penata Muda	6	1	7
<i>Jumlah Golongan III</i>			<i>14</i>	<i>7</i>	<i>20</i>
7	II/c	Pengatur Tk.I	2	-	2
<i>Jumlah Golongan II</i>			<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>
<b>TOTAL</b>			<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2024.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 14 (Empat Belas) orang dan golongan II sebanyak 2 (Dua) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S1	10	7	17
2	D3	3	-	3
3	SLTA/SMK	5	-	5
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>

*Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebanyak 25 (Dua puluh lima) orang terdiri dari pendidikan S1 berjumlah 17 (tujuh belas) orang, D3 berjumlah 3 (tiga) orang dan SMA berjumlah 5 (lima) orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Daftar Susunan Pegawai Negeri**

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Ket
1.	Yames M.K. Therik, SH NIP. 19800429 199903 1 001	Pembina Tk.I / IV b	Kepala Dinas	S1
2.	Leri A. Z. Rotte, SH NIP. 19710419 200604 1 002	Pembina / IV a	Sekretaris	S1
3.	Heince O. Pollo, SE NIP. 19731024 200604 1 009	Pembina / IV a	Kepala Bidang Pendayagunaan SDA dan TGT	S1
4.	Apriliyani Manubulu, SE NIP. 19770424 200604 2 035	Pembina / IV a	Kepala Bidang PM dan PSD	S1
5.	Arpolita H. Dae Panie, SE NIP. 19830608 201001 2 032	Penata Tk.I / III d	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kel	S1
6.	Wendie Y . M. Eoh Ndolu, ST NIP. 19760319 201101 2 002	Penata Tk. I / III d	Kepala Bidang UED & Pembangunan Kawasan Perdesaan	S1
7.	Indriyati T. Therik, SE NIP. 19720811 199203 2 010	Penata Tk.I / III d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	SI
8.	Maxs D. Langga, A.Md.Par NIP. 19760918 200604 1 005	Penata TK.I/ III d	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	D3
9.	Yakoba Marlein Lenggu, SE NIP. 19830327 201001 2 029	Penata Tk.I / III d	Perencana Ahli Muda	S1
10	Lili Daryati, SH NIP. 19850709 200701 2 002	Penata TK.I / III d	Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Muda	S1
11	Yufriana Dethan, S.Sos NIP. 19750717 201212 2 003	Penata TK.I / III d	Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Muda	D3
12	Daud Nalle, A.Md, Gz NIP. 19851013 201001 1 019	Penata / III c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1
13	Matheos Bessie, SE NIP. 19830217 200701 1 005	Penata / III c	Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Muda	SLTA
14	Kristian Toulasik NIP. 19670115 198609 1 001	Penata Muda Tk. I / III b	Pengelola Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam	S1
15	Marthinus Allo, SH NIP: 19691209 200701 1 025	Penata Muda Tk. I / III b	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	S1
16	Oskar Bolla, SE NIP. 19731005 201001 1 005	Penata Muda Tk. I / III b	Penyusun Bahan Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan	S1

17	Elisa Soeki, SH NIP. 19791230 200604 1 017	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Pembangunan	S1
18	Marid F. Mbeo, SH NIP: 19780321 200701 1 007	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	S1
19	Fiktoria M. Kanuk, SH NIP. 19780201 201212 2 002	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Perencana Evaluasi dan Pelaporan	D3
20	Justen J. Elia, A.Md NIP. 19731020 201406 1 002	Penata Muda / III a	Pengelola Data	SLTA
21	Wilem W. Sui NIP: 19730604 200604 1 002	Penata Muda / III a	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	SLTA
22	Adi A. Ndaomanu NIP: 19790401 200501 1 017	Penata Muda / III a	Pengelola data Keuangan dan Pendapatan Desa	SI
23	Sigrit Ernestus Hadi, SE NIP. 19960214 202203 1 007	Penata Muda / III a	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	SI
24	Ronald Willry Mooy, SE NIP. 19960529 202203 1 002	Penata Muda / III a	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	SLTA
25	Danial Zacharias NIP. 1`9811021 201212 1 006	Pengatur / II c	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	SLTA
26	Semuel Tonak NIP. 19830610 201212 1 003	Pengatur / II c	Pengelola data Keuangan dan Pendapatan Desa	

*Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024*

Disamping Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak sebanyak 7 (Tujuh) orang.

## 2. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

### a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 9 (sembilan) Unit yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 8 (delapan) unit kendaraan roda 2 (dua) yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

### b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

**Tabel 1.4.**  
**Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya**

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Tahun Pembelian</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jmlh Barang</b>	<b>Harga</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Station wagon	2017	Baik	1	432.899.700,00
2	Sepeda motor	2006	Baik	1	8.500.000,00
3	Sepeda motor	2007	Rusak berat	1	22.300.000,00
4	Sepeda motor	2009	Rusak berat	1	20.570.000,00
5	Sepeda motor	2009	Rusak berat	1	20.570.000,00
6	Sepeda motor	2010	Baik	1	19.140.000,00
7	Sepeda motor	2011	Baik	1	24.011.500,00
8	Sepeda motor	2011	Baik	1	24.011.500,00
9	Sepeda motor	2014	Baik	1	21.200.000,00
10	Mesin gurinda	2007	RB	1	9.152.000
11	Mesin las listrik	2016	Baik	2	3.500.000,00
12	Mesin bor tangan	2016	Baik	1	545.000,00
13	Perkakas bengkel listrik	2017	Baik	1	700.000,00
14	Kunci pipa	2017	Baik	2	1.000.000,00
15	Global positioning system (GPS)	2012	Baik	2	9.999.000,00
16	Mesin tanam jagung	2017	Baik	1	2.500.000,00
17	Alat pasca panen	2017	Baik	1	750.000,00
18	Ani-ani	2017	Baik	1	2.500.000,00
19	Mesin ketik manual standar (14-16)	2012	Baik	1	2.500.000,00
20	Mesin calculator	2016	Baik	2	600.000,00
21	Rak kayu	2006	Baik	1	1.249.000,00
22	Rak kayu	2009	Baik	1	4.500.000,00
23	Filling besi/metal	2008	Baik	1	6.000.000,00
24	Brand kas	2008	Baik	1	3.360.000,00
25	Lemari kaca	2011	Baik	1	1.250.000,00
26	Rak kaca	2017	Baik	2	2.250.000,00
27	Papan nama instansi	2012	Rusak berat	1	2.500.000,00

28	Overhead projektor	2004	Baik	1	1.848.000,00
29	Alat kantor lainnnya	2007	Baik	1	250.000,00
30	Alat kantor lainnnya	2009	Rusak berat	1	12.300.000,00
31	Genset	2012	Baik	1	6.500.000,00
32	Lemari kayu	2009	Baik	1	1.800.000,00
33	Lemari kayu	2010	Baik	1	1.996.000,00
34	Lemari kayu	2010	Baik	1	8.000.000,00
35	Lemari kayu	2011	Baik	4	28.322.000,00
36	Lemari kayu	2013	Baik	1	9.200.000,00
37	Meja rapat	2009	Baik	1	4.800.000,00
38	Meja rapat	2010	Baik	1	9.570.000,00
39	Kursi tamu	2017	Baik	1	7.500.000,00
40	Kursi tamu	2019	Baik	5	5.625.000,00
41	Kursi tangan	2014	Baik	1	4.675.000,00
42	Bangku tunggu	2010	Baik	1	2.630.000,00
43	Meja biro	2010	Baik	1	2.570.000,00
44	Sofa	2006	Kurang baik	1	2.149.000,00
45	Kursi plastik	2006	Baik	1	1.415.000,00
46	Kursi plastik	2009	Baik	200	1.700.000,00
47	Kursi plastik	2019	Baik	3	16.900.000,00
48	Kursi kerja	2013	Baik	11	450.000,00
49	Kursi kerja	2016	Baik	56	4.932.400,00
50	Kipas angin	2016	Baik	6	2.100.000,00
51	Kipas angin	2017	Baik	1	4.500.000,00
52	Televisi	2016	Kurang baik	1	3.000.000,00
53	Wireless	2006	Baik	8	2.948.000,00
54	Mesin jahit	2016	Baik	3	20.000.000,00
55	Tiang bendera	2019	Baik	3	2.430.375,00
56	Lambang intansi	2019	Rusak berat	1	7.500.000,00
57	Alat rumah tangga	2007	Baik	1	9.152.000,00
58	Tandon air	2008	Baik	1	1.750.000,00
59	Tendon air	2010	Kurang baik	1	10.000.000,00
60	P.C unit/computer PC	2013	Baik	5	11.750.000,00
61	P.C unit/computer PC	2015	Baik	2	74.250.000,00

62	P.C unit/computer PC	2016	Baik	4	23.500.000,00
63	Laptop	2015	Baik	2	49.500.000,00
64	Kipas angin	2016	Baik	6	2.100.000,00
65	Kipas angin	2017	Baik	1	4.500.000,00
66	Televisi	2016	Kurang baik	1	3.000.000,00
67	Wireless	2006	Baik	8	2.948.000,00
68	Mesin jahit	2016	Baik	3	20.000.000,00
69	Tiang bendera	2019	Baik	3	2.430.375,00
70	Lambang intansi	2019	Rusak berat	1	7.500.000,00
71	Laptop	2016	Baik	1	24.850.000,00
72	Laptop	2017	Baik	4	13.900.000,00
73	Laptop	2019	Baik	1	41.646.000,00
74	Laptop	2019	Baik	1	11.632.500,00
75	Laptop	2019	Kurang baik	2	10.412.500,00
76	Hard disk	2012	Baik	1	1.871.000,00
77	Printer	2015	Baik	1	4.000.000,00
78	Printer	2016	Baik	3	1.000.000,00
79	Printer	2018	Baik	4	10.500.000,00
80	Printer	2015	Baik	3	13.860.000,00
81	Printer	2016	Baik	1	6.900.000,00
82	Printer	2016	Baik	5	1.000.000,00
83	Printer	2017	Baik	3	17.500.000,00

84	Printer	2019	Baik	4	9.519.500,00
85	Hard disk	2019	Baik	1	900.000,00
86	DVD-Rom Drive	2016	Kurang Baik	1	1.500.000,00
87	Power supply	2009	Baik	1	990.000,00
88	Meja kerja	2015	Baik	1	2.550.000,00
89	Meja kerja	2008	Baik	3	3.300.000,00
90	Meja kerja	2013	Baik	11	17.198.500,00
91	Kursi kerja pejabat Eselor II	2016	Baik	1	2.310.000,00
92	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2014	Baik	1	2.239.000,00
93	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2006	Baik	4	10.608.000,00
94	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2019	Baik	1	2.300.000,00
95	Camera + attachment	2016	Baik	1	6.000.000,00
96	Camera + attachment	2016	Baik	1	15.000.000,00
97	Camera + attachment	2017	Baik	2	14.734.000,00
98	Proyektor + attachment	2019	Baik	1	11.725.000,00
99	Proyektor + attachment	2016	Baik	1	11.600.000,00
100	Proyektor + attachment	2017	Baik	1	9.770.000,00
101	Proyektor + attachment	2018	Baik	1	12.300.000,00
102	Proyektor + attachment	2018	Baik	1	10.068.000,00
103	Proyektor + attachment	2019	Baik	1	10.068.000,00
104	Microphone /wireless mic	2017	Baik	2	2.000.000,00
105	Microphone /wireless mic	2019	Baik	4	11.118.800,00
106	Audio command desk	2019	Baik	1	2.999.700,00
107	Microphone table stand	2019	Baik	4	1.775.400,00

108	Peralatan studio visual	2019	Baik	4	1.999.800,00
109	Stand microphone	2019	Baik	2	999.900,00
110	Slide proyektor	2012	Kurang baik	2	20.000.000,00
111	Proyektor + attachment	2017	Baik	1	9.770.000,00
112	Camera film	2014	Baik	3	5.445.000,00
113	Loudspeaker	2019	Baik	4	47.946.800,00
114	Sound system	2010	Kurang baik	1	24.860.000,00
115	Facsimile	2016	Baik	1	1.750.000,00
116	Wireless amplifier	2017	Baik	1	5.000.000,00
117	Antenna SHF/parabola portable	2016	Baik	1	1.750.000,00
118	Bak fiberglass	2015	Baik	2	7.350.000,00
119	Baterai	2012	Kurang baik	1	900.000,00
120	Bangunan gedung kantor permanen	2007	Baik	1	332.100.000,00
121	Bangunan gedung kantor permanen	2019	Baik	1	348.300.000,00
122	Bangunan gedung tempat permanen	2008	Baik	1	318.758.342,36
123	Ilmu pengetahuan umum	2016	Baik	12	600.000,00
124	Buku umum	2015	Baik	6	600.000,00
125	Maket & foto dokumen	2016	Baik	6	2.400.000,00
126	Maket & foto dokumen	2016	Baik	26	3.900.000,00
Jumlah					<b>2.932.140.707</b>

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2024*

#### **D. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dan
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

#### **E. Sistematika Pelaporan**

LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Kata Pengantar**

##### **Ikhtisar Eksekutif**

##### **Daftar Isi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika

penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

A. Latar Belakang.

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

B. Maksud Dan Tujuan.

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

C. Gambaran Umum.

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

D. Dasar Hukum.

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

E. Sistematika Laporan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

## BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao.

## 2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao

### B. Indikator Kinerja Utama.

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

### C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2024.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

### A. Kerangka Pengukuran Kinerja.

Menyajikan metode dan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan perbandingan target dan realisasi, perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan tahun akhir RENSTRA

### B. Capaian Kinerja

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 beserta rincian belanja per-program.

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Menguraikan Aspek Capaian Kinerja Sasaran

### D. Kinerja Keuangan.

Menyajikan Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan dan Desa

## BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024**

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga

perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya

#### 1. Pernyataan Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: “**Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**”.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

##### ➤ **BERTUMBUH:**

- Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR/SEJAHTERA:**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT:**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT:**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-

programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang organisasi dan tata laksana melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang professional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

## 2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao adalah: **“Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi

serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao yakni:

➤ **“Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”.**

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao antara lain:

- 1) Penataan Kelembagaan Desa
- 2) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan melalui 4 (Empat) Program, yaitu

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu:**

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
  - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan yaitu:
  - a. Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
  - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## **2. Program Penataan Desa**

7. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.
- a. Sub Kegiatan Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

## **3. Program Administrasi Pemerintah Desa**

8. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
  - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa
  - d. Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa
  - e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Des dan Lembaga Kerja sama antar Desa

#### **4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

9. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lemabaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Fasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

#### **B. Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)**

Tujuan/Sasaran	Indikator		Formula Pengukuran
<b>Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa</b>	1.	<b>Indeks Desa Membangun</b>	<b>Indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan</b>
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Persentase Desa Maju dan Berkembang	$\frac{\text{Jumlah Desa Maju} + \text{Desa Berkembang}}{\text{Jumlah Total Desa}} \times 100$
	2.	Realisasi APBDes	$\frac{\text{Realisasi APBDes}}{\text{Total APBDes}} \times 100$
	3.	Persentase Bumdes Berkembang	$\frac{\text{Jumlah Bumdes Berkembang}}{\text{Total Bumdes}} \times 100$

### C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/ tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa		<b>Indeks Desa Membangun</b>	Poin	0,65
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa maju dan Berkembang	%	74,50
		Realisasi APBDes	%	100
		Persentase Bumdes Berkembang	%	28,57

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan

atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja**

<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)</b>	<b>Kategori</b>
<b>&gt; 90</b>	Sangat Tinggi
<b>&gt; 75 s.d 90</b>	Tinggi
<b>&gt; 65 s.d 75</b>	Sedang
<b>≥ 50 s.d 65</b>	Rendah
<b>&lt; 50%</b>	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- **Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja $\geq$ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja $<$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar  $> 0\%$  maka dikategorikan “Efisien”, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya

semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar  $\leq 0\%$  maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio  $\geq 1$  maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio  $< 1$  sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

## B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

### Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**

### Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan masyarakat	Index Desa Membangun	poin	0,65	0,64	98,04	Sangat Tinggi
	<b>Capaian Kinerja Tujuan</b>				<b>98,04</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
<b>CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>					<b>98,04</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dengan 1 (satu) Indikator Tujuan dengan capaian kinerja sebesar **98,04 %** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

**Gambar 3.2**  
**Grafik Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024**



*Sumber : Data Olahan, 2024*

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 1 (satu) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0 %;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

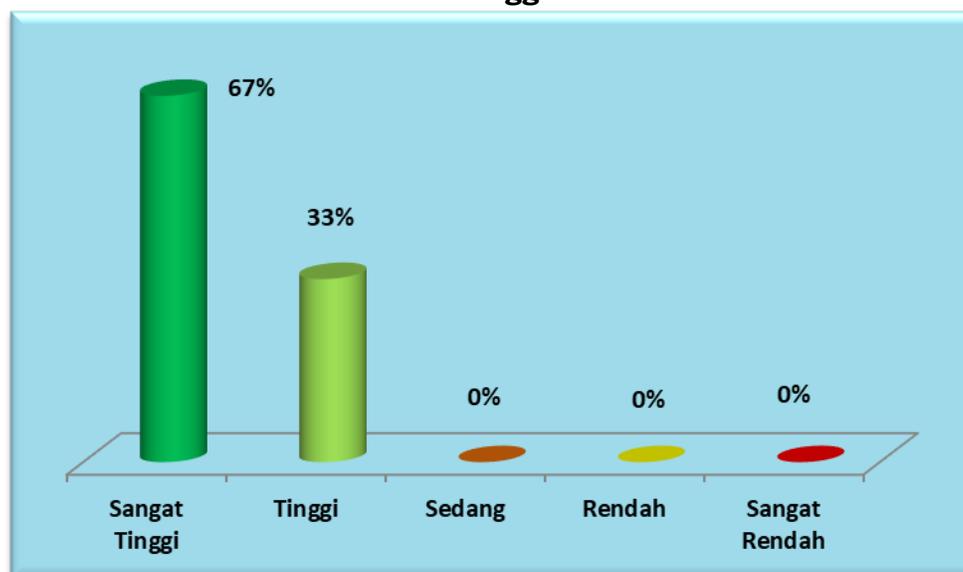
**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun Anggaran 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa maju dan Berkembang	%	74,50	75,00	100,67	Sangat Tinggi
	Realisasi APBDes	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Bumdes Berkembang	%	28,57	23,76	83,16	Tinggi
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran</b>				<b>94,61</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA</b>					<b>94,61</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **94,61%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**,

**Gambar 3.3**  
**Tingkat Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun Anggaran 2024**



Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 2 (dua) indikator atau 67%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 1 indikator atau 33 %;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

<b>TUJUAN</b>
<b>Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>

Mencapai Pembangunan yang berkelanjutan kesejahteraan, dan kesenjangan sosial, Pemberdayaan dapat memberikan Masyarakat dan desa kemampuan untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, meningkatkan akses terhadap Pendidikan dan layanan Kesehatan, serta memperkuat partisipasi dalam pengambilan Keputusan lokal, dan dapat menciptakan komunitas yang lebih mandiri dan berdaya berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial inklusif

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Index Desa Membangun	poin	0,00	0,65	0,64	98,04	0,65	0	98,04
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>98,04</b>	<b>Sangat Tinggi</b>		

Sumber data: data olahan 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Desa Membangun.

**1) Indeks Desa Membangun**

Indikator Indeks Desa Membangun adalah indeks Komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni indeks Ketahanan sosial, indeks Ketahanan ekonomi dan indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan.

Jumlah Desa maju yang berada di Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Rekapitulasi Indeks Desa Membangun sampai dengan tahun 2024 sebanyak Desa Maju 12 desa, dan Desa Berkembang 72 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4.  
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Periode 2023-2024**

KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	
		2023	2024
ROTE BARAT DAYA	OESELI	BERKEMBANG	MAJU
	OEBOU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	LALUKOEN	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	OEHANDI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	OETEFU	MAJU	MAJU
	BATUTUA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	MEOAIN	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	OEBAFOK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	OEBATU	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	MBOKAK	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	LEKIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	DOLASI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	OELASIN	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	LANDU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	LENERA	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	SANGGADOLU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	SAKUBATUN	MAJU	BERKEMBANG
	FUAFUNI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
DALEK ESA	TERTINGGAL	TERTINGGAL	
ROTE BARAT LAUT	TEMAS	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	MODOSINAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	NETENAEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	INGGUINAK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	OETUTULU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	DAUDOLU	BERKEMBANG	BERKEMBANG

	TUALIMA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	HUNDIHUK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	SAINDULE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	BUSALANGGA TIMUR	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	BUSALANGGA BARAT	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>LAOHOLU</b>	OELUA	MAJU	MAJU
	HOLULAI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	TOLAMA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	OEOLE	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	TASILO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	BONI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	BALAOLI	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	OEBELA	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	LIDOR	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	MUNDEK	TERTINGGAL	TERTINGGAL
<b>LOBALAIN</b>	KULI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	BEBALAIN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	KOLOBOLON	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	HELEBEIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	SANGGAOEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	HOLOAMA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	TUANATUK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	OELUNGGU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	OEMATAMBOLI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	SUELAIN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	BAADALE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	LEKUNIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	LOLEOEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	KULI AISELE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
OELEKA	BERKEMBANG	BERKEMBANG	
<b>ROTE TENGAH</b>	MAUBESI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	NGGODIMEDA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	LIMAKOLI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	LIDAMANU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	SUEBELA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	LIDABESI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	SIOMEDA	MAJU	MAJU
<b>PANTAI BARU</b>	BATULILOK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	LENUPETU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	SONIMANU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	OEBAU	BERKEMBANG	BERKEMBANG

	OELEDO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	KEOEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	EDALODE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	TUNGGANAMO	MAJU	MAJU
	TESA BELA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	LEKONA	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	OENGGAE	MAJU	MAJU
	FATELILO	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	OFALANGGA	MAJU	MAJU
	BATULILOK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>ROTE TIMUR</b>	MUKEKUKU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	FAIFUA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	HUNDIHOPO	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	SERUBEBA	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	LAKAMOLA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	MATASIO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	PENGODUA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	BATEFALU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	PAPELA	MAJU	MAJU
	MATANAE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>ROTE BARAT</b>	SEDEOEN	MAJU	MAJU
	NEMBERALA	MAJU	MAJU
	OENGGAUT	MAJU	MAJU
	BO"A	MAJU	MAJU
	OENITAS	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	MBUEAIN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	OELOLOT	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>ROTE SELATAN</b>	LENGUSELU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	DALEHOLU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	DODAEK	TERTINGGAL	BERKEMBANG
	TEBOLE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	INAOE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	NGGELODAE	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	PILASUE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>NDAO NUSE</b>	MBALI LENDEIKI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	ANARAE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	MBIU LOMBO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	NUSE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	NDAONUSE	BERKEMBANG	BERKEMBANG

<b>LANDU LEKO</b>	BOLATENA	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	LIFULEO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	SOTIMORI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	DAEURENDALE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	DAIAMA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	PUKUAFU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	TENA LAI	TERTINGGAL	TERTINGGAL

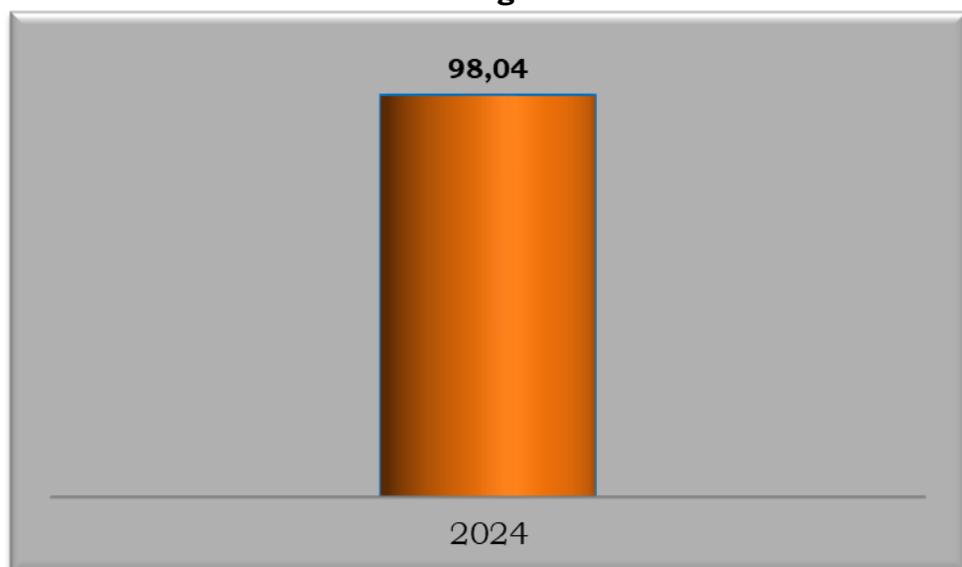
Sumber data kabupaten, hasil pengukuran indeks desa membangun tahun 2024 sesuai dengan standar operasional prosedsur (SOP) pengukuran status perkembangan desa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Desa Maju dan Berkembang pada tahun 2024 sebanyak 112 desa yang terdiri dari jumlah desa maju sebanyak 12 Desa dan jumlah desa berkembang sebanyak 72 Desa sedangkan 28 desa dikategorikan desa tertinggal.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan Indeks Desa Membangun belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 Indeks Desa Membangun ditargetkan 0,65 poin dan terealisasi 0,64 poin dengan capaian kinerja sebesar 98,04%

**Gambar 3.2.**  
**Tren Indeks Desa Membangun Tahun 2024**



Sumber data: Olahan data penyusunan LKIP 2024

### **Analisis Trend beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja tujuan Indeks Desa Membangun selama 1 (satu) tahun telah tercapai sebesar 98,04%.

### ***Analisis Perbandingan Realisasi tahun 2024 dengan target akhir Renstra tahun 2024***

Realisasi indikator kinerja tujuan Indeks Desa Membangun pada tahun 2024 sebesar 0,64 poin jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 0,65 poin menunjukkan bahwa belum mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja belum tercapai sebesar 98,04%, dan masih terdapat gap sebesar 1,96%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan **capaian kinerja indicator Indeks Desa Membangun**.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan **Indeks Desa Membangun** sebesar **98,04%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas indikator kinerja tujuan ini dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

Kurangnya dorongan perekonomian desa dalam kluster yang lebih produktif, Program Memajukan Desa harus lebih diutamakan, kurangnya pengembangan suatu desa yang mana di butuhkan sumber daya manusia yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan tanggap terhadap dinamika

Fokus Pembangunan Desa dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yang menysasar masyarakat miskin ekstrim seperti rumah layak huni, air bersih dan penanggulangan stunting, sehingga pembangunan lain untuk memenuhi indicator desa maju belum bisa di anggarkan sepanjang target penurunan ekstrim belum tercapai. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator kinerja tujuan ini adalah **Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintah Desa, dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 637.094.000 (*Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 595.535.807 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*) atau sebesar 93,48%

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran

besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja**  
**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan Desa**

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
<b>98,04</b>	<b>93,48</b>	<b>6,52</b>	<b>Efisien</b>	<b>1,05</b>	<b>Efektif</b>

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan Desa** mencapai tingkat efisiensi sebesar 6,52% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,05% sehingga dikategorikan **Efektif**.

<b>SASARAN</b>
<b>Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Secara umum pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah komunitas. Pembangunan desa tersebut menekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat desa. Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya, maka itu kebutuhan masyarakat yang di dukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satunya yaitu, Persentase Desa Maju dan Berkembang, Realisasi APBDes dan Persentase Bumdes Berkembang yang proporsional melalui penataan kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Tabel 3.6.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase Desa Maju dan Berkembang	%	100	74,50	75,50	100,67	75,00	100,67	100
2	Realisasi APBDes	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100
5	Persentase Bumdes Berkembang	%	100	28,57	23,76	83,16	23,76	83,16	470
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan</b>						<b>94,61</b>	<b>Sangat Tinggi</b>		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase Desa Maju Dan Berkembang, Realisasi APBDes dan Persentase Bumdes Berkembang, Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

**1) Persentase Desa Maju dan Berkembang**

Indikator Persentase Desa Maju dan Berkembang adalah Jumlah Desa Maju ditambah Desa Berkembang dibandingkan dengan Total Desa.

Jumlah Desa maju yang berada di Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Rekapitulasi Indeks Desa Membangun sampai dengan tahun 2024 sebanyak Desa Maju 12 desa, dan Desa Berkembang 72 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Periode Tahun 2024**

KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	
		2023	2024
<b>ROTE BARAT DAYA</b>	1 OESELI	BERKEMBANG	MAJU
	2 OEBOU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	3 LALUKOEN	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	4 OEHANDI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	5 OTEFU	MAJU	MAJU

	6	BATUTUA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	7	MEOAIN	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	8	OEBAFOK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	9	OEBATU	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	10	MBOKAK	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	11	LEKIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	12	DOLASI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	13	OELASIN	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	14	LANDU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	15	LENERA	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	16	SANGGANDOLU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	17	SAKUBATUN	MAJU	BERKEMBANG
	18	FUAFUNI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	19	DALEK ESA	TERTINGGAL	TERTINGGAL
<b>ROTE BARAT LAUT</b>	1	TEMAS	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	2	MODOSINAL	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	3	NETENAEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	4	INGGUINAK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	5	OETUTULU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	6	DAUDOLU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	7	TUALIMA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	8	HUNDIHUK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	9	SAINDULE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	10	BUSALANGGA TIMUR	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	11	BUSALANGGA BARAT	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>LAOHOLU</b>	1	OELUA	MAJU	MAJU
	2	HOLULAI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		TOLAMA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		OEBOLE	TERTINGGAL	TERTINGGAL
		TASILO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		BONI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		BALAOLI	TERTINGGAL	TERTINGGAL
		OEBELA	TERTINGGAL	TERTINGGAL
		LIDOR	TERTINGGAL	TERTINGGAL
		MUNDEK	TERTINGGAL	TERTINGGAL
<b>LOBALAIN</b>	1	KULI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	2	BEBALAIN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	3	KOLOBOLON	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	4	HELEBEIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	5	SANGGAOEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	6	HOLOAMA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	7	TUANATUK	BERKEMBANG	BERKEMBANG

	8	OELUNGU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	9	OEMATAMBOLI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	10	SUELAIN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	11	BAADALE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	12	LEKUNIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	13	LOLEOEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	14	KULI AISELE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	15	OELEKA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>ROTE TENGAH</b>	1	MAUBESI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	2	NGGODIMEDA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	3	LIMAKOLI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	4	LIDAMANU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	5	SUEBELA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	6	LIDABESI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	7	SIOMEDA	MAJU	MAJU
<b>PANTAI BARU</b>		BATULILOK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		LENUPETU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		SONIMANU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
		OEBAU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		OELEDO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		KEOEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		EDALODE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		TUNGGANAMO	MAJU	MAJU
		TESA BELA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		LEKONA	TERTINGGAL	TERTINGGAL
		OENGGAE	MAJU	MAJU
		FATELILO	BERKEMBANG	TERTINGGAL
		OFALANGGA	MAJU	MAJU
		BATULILOK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>ROTE TIMUR</b>	1	MUKEKUKU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	2	FAIFUA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	3	HUNDIHOPO	BERKEMBANG	TERTINGGAL
	4	SERUBEBA	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	5	LAKAMOLA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	6	MATASIO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	7	PENGODUA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	8	BATEFALU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	9	PAPELA	MAJU	MAJU
	10	MATANAE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>ROTE BARAT</b>	1	SEDEOEN	MAJU	MAJU
	2	NEMBERALA	MAJU	MAJU

	3	OENGAUT	MAJU	MAJU
	4	BO"A	MAJU	MAJU
	5	OENITAS	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	6	MBUEAIN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	7	OELOLOT	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>ROTE SELATAN</b>	1	LENGUSELU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	2	DALEHOLU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	3	DODAEK	TERTINGGAL	BERKEMBANG
	4	TEBOLE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	5	INAOE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	6	NGGELODAE	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	7	PILASUE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>NDAO NUSE</b>	1	MBALI LENDEIKI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	2	ANARAE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	3	MBIU LOMBO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	4	NUSE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	5	NDAONUSE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>LANDU LEKO</b>	1	BOLATENA	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	2	LIFULEO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	3	SOTIMORI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	4	DAEURENDALE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	5	DAIAMA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
	6	PUKUAFU	TERTINGGAL	TERTINGGAL
	7	TENA LAI	TERTINGGAL	TERTINGGAL

Sumber data kabupaten, hasil pengukuran indeks desa membangun tahun 2024 sesuai dengan standar operasional prosedsur (SOP) pengukuran status perkembangan desa

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Desa Maju dan Berkembang pada tahun 2024 sebanyak 84 desa Maju dan Berkembang atau sebesar 75,00% hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target sebesar 100,67%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024**

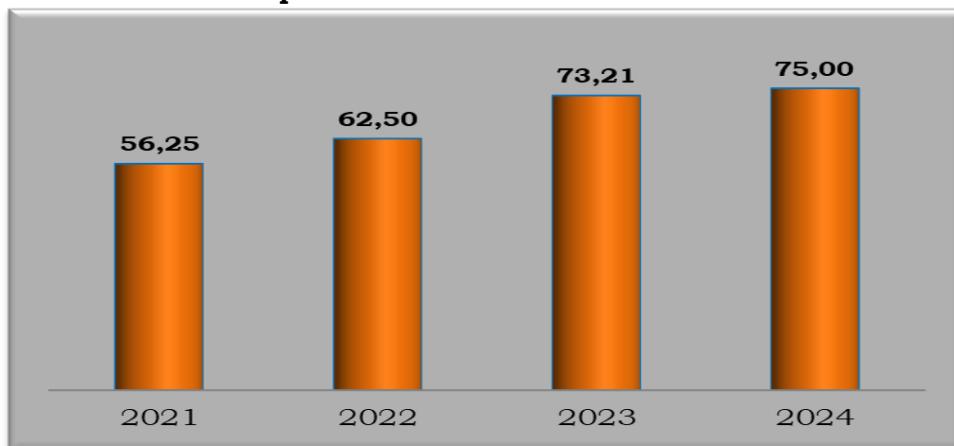
Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Persentase Desa Maju dan Berkembang telah Melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, indikator kinerja sasaran Persentase Desa Maju dan Berkembang ditargetkan sebesar 74,50% dan terealisasi sebesar 75,00% dengan capaian kinerja sebesar 100,67%.

### ***Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun sebelumnya***

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase Desa Maju dan Berkembang tahun 2024 sebesar 100,67% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 0,67% dan capaian kinerja sebesar 100,67% dari tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, Persentase Desa Maju dan Berkembang tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 35,92% dari capaian tahun 2023, sehingga terjadi penurunan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2023 sebesar 136,59%.

**Gambar 3.3.**  
**Trend Persentase Desa Maju dan Berkembang**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024**



Sumber : Olahan Data penyusunan LKIP Tahun 2024

### **Tren beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Desa Maju dan Berkembang selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan secara signifikan yakni periode tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RENSTRA Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Desa Maju dan Berkembang pada tahun 2024 sebesar 75,00% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 74,50%, maka menunjukkan bahwa belum mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja belum tercapai sebesar 75,00%, dengan kinerja belum tercapai sebesar 100,67%

sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indicator Persentase Desa Maju dan Berkembang.

## 2). Realisasi APBDes

Indikator Realisasi APBDes adalah Perbandingan Realisasi APBDes dengan Total APBDes, Jumlah Desa yang di dukung oleh APBDes yang di salurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 112 Desa yang tersebar di 11 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Tahun Anggaran 2023-2024**

NO	KECAMATAN/ DESA	PAGU APBDesa 2023	REALISASI APBDesa	PAGU APBDesa 2024	REALISASI APBDesa
<b>1</b>	<b>KECAMATAN LANDU LEKO</b>				
1	BOLATENA	1.307.632.000	1.307.632.000	1.319.184.000	1.319.184.000
2	DAEURENDALE	1.141.741.000	1.141.741.000	1.171.963.000	1.171.963.000
3	DAIAMA	1.261.000.000	1.261.000.000	1.282.639.000	1.282.639.000
4	LIFULEO	1.191.508.000	1.191.508.000	1.240.661.000	1.240.661.000
5	PUKUAFU	1.298.301.000	1.298.301.000	1.272.664.000	1.272.664.000
6	SOTIMORI	1.216.209.000	1.216.209.000	1.494.879.000	1.494.879.000
7	TENA LAI	1.316.239.000	1.316.239.000	1.329.625.000	1.329.625.000
<b>Total</b>		<b>8.732.630.000</b>	<b>8.732.630.000</b>	<b>9.111.615.000</b>	<b>9.111.615.000</b>
<b>2</b>	<b>KECAMATAN LOAHOLU</b>				
8	BALAOLI	1.575.804.000	1.575.804.000	1.576.583.000	1.576.583.000
9	BONI	1.311.923.000	1.311.923.000	1.376.292.000	1.376.292.000
10	HOLULAI	1.375.494.000	1.375.494.000	1.389.857.000	1.389.857.000
11	LIDOR	1.358.649.000	1.358.649.000	1.358.757.000	1.358.757.000
12	MUNDEK	1.434.795.000	1.434.795.000	1.431.226.000	1.431.226.000
13	OEBELA	1.434.744.000	1.434.744.000	1.439.872.000	1.439.872.000
14	OEOLE	1.435.663.000	1.435.663.000	1.438.296.000	1.438.296.000
15	OELUA	1.476.616.000	1.476.616.000	1.741.984.000	1.741.984.000

16	TASILO	1.350.288.000	1.350.288.000	1.363.208.000	1.363.208.000
17	TOLAMA	1.520.917.000	1.520.917.000	1.784.639.000	1.784.639.000
<b>Total</b>		<b>14.274.893.000</b>	<b>14.274.893.000</b>	<b>14.900.714.000</b>	<b>14.900.714.000</b>
<b>3</b>	<b>KECAMATAN LOBALAIN</b>				
18	BAADALE	1.117.476.000	1.117.476.000	1.136.324.000	1.136.324.000
19	BEBALAIN	1.246.285.000	1.246.285.000	1.170.498.000	1.170.498.000
20	HELEBEIK	1.706.171.000	1.706.171.000	1.513.467.000	1.513.467.000
21	HOLOAMA	1.259.056.000	1.259.056.000	1.279.201.000	1.279.201.000
22	KOLOBOLON	1.221.711.000	1.221.711.000	1.250.474.000	1.250.474.000
23	KULI	1.261.757.000	1.261.757.000	1.312.426.000	1.312.426.000
24	KULI AISELE	1.279.752.000	1.279.752.000	1.290.984.000	1.290.984.000
25	LEKUNIK	982.817.000	982.817.000	1.020.981.000	1.020.981.000
26	LOLEOEN	1.201.400.000	1.201.400.000	1.245.349.000	1.245.349.000
27	OELEKA	1.132.724.000	1.132.724.000	1.147.161.000	1.147.161.000
28	OELUNGGU	1.310.612.000	1.310.612.000	1.340.033.000	1.340.033.000
29	OEMATAMBOLI	1.347.886.000	1.347.886.000	1.228.400.000	1.228.400.000
30	SANGGAOEN	1.404.767.000	1.404.767.000	1.425.491.000	1.425.491.000
31	SUELAIN	1.257.723.000	1.257.723.000	1.225.461.000	1.225.461.000
32	TUANATUK	1.302.297.000	1.302.297.000	1.225.461.000	1.225.461.000
<b>Total</b>		<b>19.032.434.000</b>	<b>19.032.434.000</b>	<b>18.811.711.000</b>	<b>18.811.711.000</b>
<b>4</b>	<b>KECAMATAN NDAO NUSE</b>				
33	ANARAE	1.195.628.000	1.195.628.000	1.216.133.000	1.216.133.000
34	MBALI LENDEIKI	1.247.034.000	1.247.034.000	1.262.870.000	1.262.870.000
35	MBIU LOMBO	1.103.876.000	1.103.876.000	1.136.526.000	1.136.526.000
36	NDAO NUSE	1.204.419.000	1.204.419.000	1.232.361.000	1.232.361.000
37	NUSE	1.090.485.000	1.090.485.000	1.101.633.000	1.101.633.000
<b>Total</b>		<b>5.841.442.000</b>	<b>5.841.442.000</b>	<b>5.949.523.000</b>	<b>5.949.523.000</b>
<b>5</b>	<b>KECAMATAN PANTAI BARU</b>				
38	BATULILOK	1.530.004.000	1.530.004.000	1.336.474.000	1.336.474.000
39	EDALODE	1.426.774.000	1.426.774.000	1.234.723.000	1.234.723.000
40	FATELILO	1.594.238.000	1.594.238.000	1.426.753.000	1.426.753.000

41	KEOEN	1.557.657.000	1.557.657.000	1.552.545.000	1.552.545.000
42	LEKONA	1.266.120.000	1.266.120.000	1.278.230.000	1.278.230.000
43	LENUPETU	1.174.165.000	1.174.165.000	1.187.543.000	1.187.543.000
44	NUSAKDALE	1.281.902.000	1.281.902.000	1.356.307.000	1.356.307.000
45	OEBAU	1.593.888.000	1.593.888.000	1.483.174.000	1.483.174.000
46	OELEDO	1.188.105.000	1.188.105.000	1.209.025.000	1.209.025.000
47	OENGGAE	1.308.167.000	1.308.167.000	1.144.991.000	1.144.991.000
48	OFALANGGA	1.337.940.000	1.337.940.000	1.418.118.000	1.418.118.000
49	SONIMANU	1.257.325.000	1.257.325.000	1.298.890.000	1.298.890.000
50	TESA BELA	1.189.706.000	1.189.706.000	1.214.167.000	1.214.167.000
51	TUNGGANAMO	1.437.858.000	1.437.858.000	1.474.265.000	1.474.265.000
<b>Total</b>		<b>19.143.849.000</b>	<b>19.143.849.000</b>	<b>18.615.205.000</b>	<b>18.615.205.000</b>
<b>6</b>	<b>KECAMATAN ROTE SELATAN</b>				
52	DALEHOLU	1.066.689.000	1.066.689.000	1.092.971.000	1.092.971.000
53	DODAEK	1.201.353.000	1.201.353.000	1.221.755.000	1.221.755.000
54	INAOE	1.118.618.000	1.118.618.000	1.329.625.000	1.329.625.000
55	LENGUSELU	1.267.405.000	1.267.405.000	1.329.625.000	1.329.625.000
56	NGGELODAE	1.239.364.000	1.239.364.000	1.274.200.000	1.274.200.000
57	PILASUE	1.185.443.000	1.185.443.000	1.208.976.000	1.208.976.000
58	TEBOLE	1.503.400.000	1.503.400.000	1.303.531.000	1.303.531.000
<b>Total</b>		<b>8.582.272.000</b>	<b>8.582.272.000</b>	<b>8.760.683.000</b>	<b>8.760.683.000</b>
<b>7</b>	<b>KECAMATAN ROTE BARAT</b>				
59	BO"A	1.366.781.000	1.366.781.000	1.434.804.000	1.434.804.000
60	MBUEAIN	1.163.657.000	1.163.657.000	1.179.292.000	1.179.292.000
61	NEMBERALA	1.065.816.000	1.065.816.000	1.346.600.000	1.346.600.000
62	OELOLOK	1.344.125.000	1.344.125.000	1.287.483.000	1.287.483.000
63	OENGGAUT	1.067.724.000	1.067.724.000	1.369.271.000	1.369.271.000
64	OENITAS	1.528.749.000	1.528.749.000	1.616.526.000	1.616.526.000
65	SEDEOEN	1.148.678.000	1.148.678.000	1.420.665.000	1.420.665.000
<b>Total</b>		<b>8.685.530.000</b>	<b>8.685.530.000</b>	<b>9.654.641.000</b>	<b>9.654.641.000</b>

<b>8</b>	<b>KECAMATAN ROTE BARAT DAYA</b>				
66	BATUTUA	1.283.232.000	1.283.232.000	1.555.375.000	1.555.375.000
67	DALEK ESA	1.399.169.000	1.399.169.000	1.403.890.000	1.403.890.000
68	DOLASI	1.296.523.000	1.296.523.000	1.307.698.000	1.307.698.000
69	FUAFUNI	1.357.704.000	1.357.704.000	1.279.924.000	1.279.924.000
70	LALUKOEN	1.685.153.000	1.685.153.000	1.717.917.000	1.717.917.000
71	LANDU	1.330.237.000	1.330.237.000	1.335.731.000	1.335.731.000
72	LEKIK	1.382.824.000	1.382.824.000	1.386.193.000	1.386.193.000
73	LENERA	1.679.637.000	1.679.637.000	1.494.022.000	1.494.022.000
74	MBOKAK	1.275.688.000	1.275.688.000	1.494.022.000	1.494.022.000
75	MEOAIN	1.255.425.000	1.255.425.000	1.494.022.000	1.494.022.000
76	OEBAFOK	1.450.238.000	1.450.238.000	1.484.255.000	1.484.255.000
77	OEBATU	1.584.037.000	1.584.037.000	1.520.083.000	1.520.083.000
78	OEOU	1.550.037.000	1.550.037.000	1.627.510.000	1.627.510.000
79	OEHANDI	1.666.305.000	1.666.305.000	1.483.388.000	1.483.388.000
80	OELASIN	1.665.869.000	1.665.869.000	1.733.225.000	1.733.225.000
81	OESLI	1.732.493.000	1.732.493.000	1.661.218.000	1.661.218.000
82	OETEFU	1.721.131.000	1.721.131.000	1.806.285.000	1.806.285.000
83	SAKUBATUN	1.260.315.000	1.260.315.000	1.286.103.000	1.286.103.000
84	SANGGANDOLU	1.390.676.000	1.390.676.000	1.400.956.000	1.400.956.000
<b>Total</b>		<b>27.966.693.000</b>	<b>27.966.693.000</b>	<b>28.471.817.000</b>	<b>28.471.817.000</b>
<b>9</b>	<b>KECAMATAN ROTE BARAT LAUT</b>				
85	BUSALANGGA BARAT	1.361.686.000	1.361.686.000	1.369.869.000	1.369.869.000
86	BUSALANGGA TIMUR	1.306.216.000	1.306.216.000	1.321.989.000	1.321.989.000
87	DAUDOLU	1.370.839.000	1.370.839.000	1.392.263.000	1.392.263.000
88	HUNDIHUK	1.399.909.000	1.399.909.000	1.414.224.000	1.414.224.000
89	INGGUINAK	1.475.965.000	1.475.965.000	1.618.300.000	1.618.300.000
90	MODOSINAL	1.609.676.800	1.609.676.800	1.618.300.000	1.618.300.000
91	NETENAEN	1.294.365.000	1.294.365.000	1.313.692.000	1.313.692.000
92	OETUTULU	1.360.573.000	1.360.573.000	1.409.196.000	1.409.196.000
93	SAINDULE	1.144.895.000	1.144.895.000	1.409.196.000	1.409.196.000

94	TEMAS	1.447.067.000	1.447.067.000	1.456.869.000	1.456.869.000
95	TUALIMA	1.072.903.000	1.072.903.000	1.226.965.000	1.226.965.000
<b>Total</b>		<b>14.844.094.800</b>	<b>14.844.094.800</b>	<b>15.550.863.000</b>	<b>15.550.863.000</b>
<b>10</b>	<b>KECAMATAN ROTE TENGAH</b>				
96	LIDABESI	1.271.762.000	1.271.762.000	1.304.769.000	1.304.769.000
97	LIDAMANU	1.466.747.000	1.466.747.000	1.297.573.000	1.297.573.000
98	LIMAKOLI	1.173.777.000	1.173.777.000	1.196.488.000	1.196.488.000
99	MAUBESI	1.356.918.000	1.356.918.000	1.373.701.000	1.373.701.000
100	NGGODIMEDA	1.343.523.000	1.343.523.000	1.354.525.000	1.354.525.000
101	SIOMEDA	1.311.217.000	1.311.217.000	1.170.655.000	1.170.655.000
102	SUEBELA	1.586.545.000	1.586.545.000	1.170.655.000	1.170.655.000
<b>Total</b>		<b>9.510.489.000</b>	<b>9.510.489.000</b>	<b>8.868.366.000</b>	<b>8.868.366.000</b>
<b>11</b>	<b>KECAMATAN ROTE TIMUR</b>				
103	BATEFALU	1.309.835.000	1.309.835.000	1.324.983.000	1.324.983.000
104	FAIFUA	1.286.712.000	1.286.712.000	1.572.915.000	1.572.915.000
105	HUNDIHOPO	1.229.567.000	1.229.567.000	1.256.287.000	1.256.287.000
106	LAKAMOLA	1.151.231.000	1.151.231.000	1.177.727.000	1.177.727.000
107	MATANAE	1.205.725.000	1.205.725.000	1.220.729.000	1.220.729.000
108	MATASIO	1.243.774.000	1.243.774.000	1.261.828.000	1.261.828.000
109	MUKEKUKU	1.347.008.000	1.347.008.000	1.384.692.000	1.384.692.000
110	PAPELA	1.457.583.000	1.457.583.000	1.740.981.000	1.740.981.000
111	PENGODUA	1.221.781.000	1.221.781.000	1.233.522.000	1.233.522.000
112	SERUBEBA	1.386.529.000	1.386.529.000	1.396.133.000	1.396.133.000
<b>Total</b>		<b>12.839.745.000</b>	<b>12.839.745.000</b>	<b>13.569.797.000</b>	<b>13.569.797.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>149.454.071.800</b>	<b>149.454.071.800</b>	<b>144.264.936.000</b>	<b>144.264.936.000</b>

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa Anggaran APBDes 2024 yang di Anggaran sebesar Rp. 144.264.936.000 (*seratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*) dan terealisasi sebesar 144.264.936.000 (*seratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*) hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mencapai target sebesar 100%.

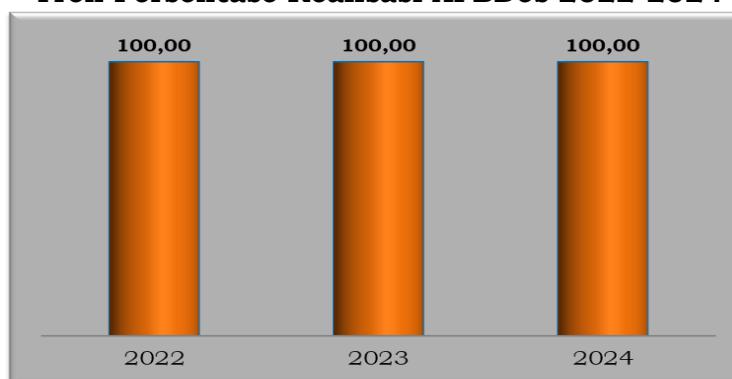
### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Realisasi APBDes telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024, Realisasi APBDes ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun sebelumnya**

Capaian indikator kinerja sasaran Realialisasi APBDes pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar 3.7.**  
**Tren Persentase Realisasi APBDes 2022-2024**



### **Tren beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja Realisasi APBDes selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama atau stabil yakni tahun 2022 – 2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RENSTRA Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja sasaran Realisasi APBDes pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA

2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja indicator Realisasi APBDes.

### 3). Persentase Bumdes Berkembang

Indikator Persentase Bumdes Berkembang adalah Perbandingan Jumlah Bumdes Berkembang/ total bumdes.

Dinas PMD pada tahun 2024 melakukan pembinaan kepada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa ) sesuai Potensi Desa, Jumlah BUMDES yang di bina oleh Dinas PMD pada 2024 sebanyak 24 Bumdes berkembang sedangkan pada tahun Tahun 2023 sebanyak 22 Bumdes berkembang dari total Bumdes sebanyak 101 Bumdes yang tersebar di 11 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.11.**  
**Nama- nama BUMDES di Kabupaten Rote Ndao**  
**Keadaan 2023-2024**

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA 2023	NAMA BUMDESA 2024	STATUS 2023	STATUS 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>RBD</b>	MEOAIN	PEDU BEUK	PEDU BEUK	BERKEMBANG	-
2		LEKIK	-	-	BERKEMBANG	-
3		OELASIN	-	-	BERKEMBANG	-
4		OESELI	-	-	BERKEMBANG	BERKEMBANG
5		OEBOU	-	-	BERKEMBANG	-
6		OEBAFOK	-	-	BERKEMBANG	-
7		OEHANDI	-	-	BERKEMBANG	BERKEMBANG
8		OETEFU	TIA METI	TIA METI	BERKEMBANG	-
9		BATUTUA	BATUTUA	BATUTUA	BERKEMBANG	-
10		OEBATU	TIRO DANGGA	TIRO DANGGA	BERKEMBANG	-
11		DOLASI	LEDO MBENA	LEDO MBENA	BERKEMBANG	-
12		LANDU	TIA TASI	TIA TASI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
13		LENTERA	PELITA	PELITA	BERKEMBANG	-
14		FUAFUNI	KORU SORU	KORU SORU	BERKEMBANG	-
15	<b>RBL</b>	MODOSINAL	SUE LAI	SUE LAI	BERKEMBANG	-
16		OETUTULU	SANGGA SODA	-	BERKEMBANG	-
17		TUALIMA	TUA TITI	TUA TITI	BERKEMBANG	-
18	<b>LOAHOLU</b>	OELUA	SEJAHTERA	SEJAHTERA	BERKEMBANG	-

19		LIDOR	DALEHOLU	DALEHOLU	BERKEMBANG	-
20		OEBELA	BELA SUE	BELA SUE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
21		HOLULAI	FELA LEO	FELA LEO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
22		TASILO	TAFADAOEN	TAFADAOEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
23	<b>LOBALAIN</b>	LOBALAIN		LOBALAIN MANDIRI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		KULI AISELE	SANGGA SODAK	SANGGA SODAK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
24		KOLOBOLON	FALI OLI	FALI OLI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
25		SANGGAOEN	OKA BEUK	OKA BEUK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
26		HOLOAMA	FIA FANGGA	FIA FANGGA	BERKEMBANG	-
27		OELUNGGU	BERDIKARI JAYA	BERDIKARI JAYA	BERKEMBANG	-
28		LEKUNIK	MBULESIO	MBULESIO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
29	<b>ROTE TENGAH</b>	MAUBESI	NAMAHENA	NAMAHENA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
30		NGGODIME DA	TULU FALI	TULU FALI	BERKEMBANG	-
31		SIOMEDA	LOPA MAU	LOPA MAU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
32		SONIMANU	SUELAI	SUELAI	BERKEMBANG	-
33		TUNGGANA MO	TUNGA OLI	TUNGA OLI	BERKEMBANG	-
34		LEKONA	TULI DEI	TULI DEI	BERKEMBANG	-
35		FATELILO	SATU HATI	SATU HATI	BERKEMBANG	-
36		TESABELA	TESA TAMA	TESA TAMA	BERKEMBANG	-
37		OFALANGGA	KOLA DEA SEJAHTERA	KOLA DEA SEJAHTERA	BERKEMBANG	-
38	<b>ROTIM</b>	PAPELA	NAMODALE	NAMODALE	BERKEMBANG	-
		SERUBEBA		HARA ESA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
39		MUKEKUKU	LONTAR		BERKEMBANG	-
40		MATASIO	LOLO FALU	LOLO FALU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
41		BATEFALU	TEFA SIO	TEFA SIO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
42		PENGODUA	PENGODUA JAYA	PENGODUA JAYA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		LAKAMOLA		FAJAR BARU		BERKEMBANG
43		MATANAE	BATU BELA	BATU BELA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
44	<b>ROTE BARAT</b>	SEDEOEN	SEDEOEN	SEDEOEN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
45		OENGGAUT	SUSUEN NEU HITA	SUSUEN NEU HITA	BERKEMBANG	-
46		BO'A	CAHAYA SEJAHTERA	CAHAYA SEJAHTERA	BERKEMBANG	-
47		OENITAS	TESA LIFU	TESA LIFU	BERKEMBANG	-
48		OELOLOT	FELA LEO	FELA LEO	BERKEMBANG	-
49		NEMBERALA	ESA LOPOLINO	ESA LOPOLINO	BERKEMBANG	-

50		MBUEAIN	TEU SAMA	TEU SAMA	BERKEMBANG	-
51	<b>ROSEL</b>	DALEHOLU	MEKAR SEJAHTERA	MEKAR SEJAHTERA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
52		LENGUSELU	DULES LENGUSELU	-	BERKEMBANG	-
53		PILASUE	NGGEODETA	-	BERKEMBANG	-
54		TEBOLE	DALEK ESA	-	BERKEMBANG	-
55		DODAEK	TASI PESA	-	BERKEMBANG	-
56		INAOE	ITA ESA	ITA ESA	BERKEMBANG	BERKEMBANG
57		NGGELODAE	DALE SUE	DALE SUE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
58	<b>LANDU LEKO</b>	LIFULEO	AI DO'O	AI DO'O	BERKEMBANG	-
59		DAIAMA	MULUT SERIBU	MULUT SERIBU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
60		PUKUAFU	HARAPAN MAJU	-	BERKEMBANG	-
61		TENALAI	USAHA BARU	USAHA BARU	BERKEMBANG	-

Berdasarkan table diatas menunjukan bahwa Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berkembang pada tahun 2024 sebanyak 24 Bumdes Berkembang, dengan capaian kinerja sebesar 83,16 %

#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024**

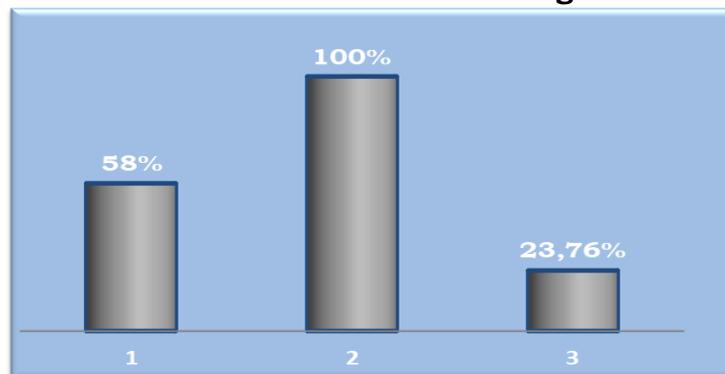
Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Persentase Bumdes Berkembang belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 28,58% dan terealisasi sebesar 23,76% dengan capaian kinerja sebesar 83,16%

#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun sebelumnya**

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase Bumdes Berkembang tahun 2024 sebesar 83,16% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 16,84% dengan capaian kinerja sebesar 83,16 % dari tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, persentase bumdes berkembang tahun 2024 menurun sebesar 16,84% dari capaian tahun 2023, sehingga terjadi Penurunan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2023 sebesar 100%

**Gambar 3.8.**  
**Tren Persentase Bumardes Berkembang 2022-2024**



#### **Tren beberapa tahun terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Bumdes Berkembang selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang Fluktuaktif yakni tahun 2021-2023 mengalami Peningkatan namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup positif.

#### **Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RENSTRA Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Bumdes Berkembang pada tahun 2024 sebesar 23,76% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 28,57%, maka menunjukkan bahwa belum mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja belum tercapai sebesar 4,81% dengan capaian kinerja sebesar 83,16% sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indicator Persentase Bumdes Berkembang.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** Tahun Anggaran 2024 sebesar **94,61%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Motifasi, sesuatu yang dapat membuat orang bertindak
- 2) Kebijakan Pemerintah, Kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui Perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya.
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola RKPDes dan RPJMDes
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 4) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah, Desa dan Istansi terkait dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Peningkatan kualitas Sumberdaya SDM pengelola RKPDes dan RPJMDes.
- 2) Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis teknologi informasi.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator kinerja tujuan ini adalah **Program Penataan Desa, Program Administrasi**

**Pemerintah Desa, dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 637.094.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Terealisasi sebesar Rp. 595.535.807 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah) atau sebesar 93,48%

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut

**Tabel 3.12.**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2023 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
<b>94,61</b>	<b>93,48</b>	<b>6,52</b>	<b>Efisien</b>	<b>1,01</b>	<b>Efektif</b>

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** mencapai tingkat efisiensi sebesar 6,52% atau dikategorikan Efisiensi. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas sebesar 1,01% berada pada nilai rasio  $\geq 1$  sehingga dikategorikan Efektif.

## 7. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.13.**  
**Realisasi Keuangan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
1.	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>		<b>2.846.690.586</b>	<b>2.806.190.586</b>	<b>98,58</b>
2	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>40.500.000</b>	<b>40.500.000</b>	<b>100,00</b>
3	<b>BELANJA TRANSFER</b>				
	<b>2.1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>2.297.620.234</b>	<b>2.251.154.779</b>	<b>97,78</b>
	<b>2.1.1</b>	<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>53.019.000</b>	<b>53.019.000</b>	<b>100,00</b>
	2.1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00
	2.1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.019.000	3.019.000	100,00
	<b>2.1.2</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.999.990.284</b>	<b>1.960.743.814</b>	<b>98,04</b>
	2.1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.954.750.284	1.916.803.814	98,06
	2.1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	45.240.000	43.940.000	97,13
	<b>2.1.3</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>100,00</b>
	2.1.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.200.000	7.200.000	100,00

2.1.5	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>		<b>130.910.950</b>	<b>130.442.439</b>	<b>99,64</b>
	2.1.5.1	Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik	4.426.500	4.426.000	99,99
	2.1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.500.000	40.500.000	100,00
	2.1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.499.300	26.499.300	100,00
	2.1.5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	20.068.150	19.933.150	99,33
	2.1.5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.417.000	39.083.989	99,16
	2.1.6	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>38.425.000</b>	<b>35.774.526</b>
2.1.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.625.000	1.625.000	100,00
2.1.6.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.800.000	34.149.526	92,80
2.1.7	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>68.075.000</b>	<b>63.975.000</b>	<b>93,98</b>
	2.1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.075.000	63.975.000	93,98
2.1	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>119.000.000</b>	<b>97.803.190</b>	<b>82,19</b>
	<b>2.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>			
	2.2.1.1	Sub Kegiatan Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	119.000.000	97.803.190	82,19
2.1	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA</b>		<b>130.000.000</b>	<b>129.700.000</b>	<b>99,77</b>
	<b>4.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi PEMDA</b>			
	4.2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000	24.830.000	99,32
	4.2.1.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	25.000.000	100,00
		Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa	25.000.000	25.000.000	100,00
		Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa	25.000.000	25.000.000	100,00
	4.2.1.8	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BumDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	30.000.000	29.870.000	99,57
2.1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>388.094.000</b>	<b>368.032.617</b>	<b>94,83</b>

5.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	5.2.1.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK,LPM dan Krang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.500.000	23.500.000	100,00
	5.2.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK,LPM dan Krang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	142.000.000	129.312.800	91,07
	5.2.1.6	Fasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.500.000	7.500.000	100,00
	5.2.1.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	215.094.000	207.719.817	96,57
<b>TOTAL</b>			<b>2.934.714.234</b>	<b>2.846.690.586</b>	<b>97,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Adapun Alokasi Anggaran, Program/Kegiatan dan realisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.934.714.234.- realisasi sebesar Rp 2.846.690.586.- atau 97.00 % dengan rincian

- Belanja Operasi sebesar Rp.2.846.690.586,- realisasi Rp. 2.806.190.586,- atau 98.58%
- Belanja Modal Rp. 40.500.000,- realisasi Rp. 40.500.000,- atau 100,00%

Alokasi Anggaran belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao untuk pembiayaan pelaksanaan 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan.

Alokasi Anggaran belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.934.714.234- (*dua miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*)

dengan realisasi sebesar Rp. 2.846.600.586,- (*dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*) atau sebesar 97.00%.

## **2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.**

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.14.**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas P M D Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran		Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja			
								Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
									Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 - 10	13	14	15 = 5 / 11	16 = 7 / 11	17
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa		1 Index Desa Membangun	98,04	98,04			PROGRAM PENATAAN DESA, PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA, PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT	637.094.000	595.535.807	93,48	41.558.193	6,52	Efisien	1,05		Efektif
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Persentase Desa maju dan Berkembang			100,67	94,61									1,01	Efektif
		2 Realisasi APBDes			100,00										1,01	Efektif
		3 Persentase Bumdes Berkembang			83,16										1,01	Efektif
Kinerja Penunjang Lainnya			-	-	-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	2.297.620.234	2.251.154.779	97,98	46.465.455	2,02	Efisien			
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan			98,04	98,04			Total Anggaran	2.934.714.234	2.846.690.586	97,00	88.023.648	3,00	EFISIEN	1,01	-	EFEKTIF
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			-		94,61	94,61									0,98	KURANG EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sebesar Rp. **2.934.714.234,-** (*dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) dengan realisasi sebesar **2.846.690.586,-** (*dua miliar delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*) atau sebesar 97,00% Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 88.023.648,- (*delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tigab ribu enam ratus empat puluh bdelapan rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 3,0% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio capaian indikator kinerja tujuan sebesar (98,04%) terhadap realisasi anggaran (93,48%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,05% atau berada pada nilai rasio > 0% sehingga dikategorikan **Efisien** dan rasio capaian indikator kinerja sasaran sebesar (94,61%) terhadap realisasi anggaran (97,00%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,01% atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **95,47%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan capaian kinerja tujuan **Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa** sebesar **98.04%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”** dan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** sebesar **94,61%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**. Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus

terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

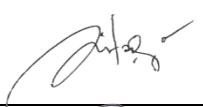
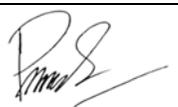
Ba'a, 22 Januari 2025  
Plt. Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Rote Ndao



**Pauwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19810725 200604 1 018

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

<b>NO</b>	<b>REVIEWER</b>	<b>CATATAN/KOREKSI</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Fungsional	1.1. Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian indikator, PK 2024	
2	Bidang PMD	2.1. Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif 2.2. Persentase Posyandu Aktif 2.3. Persentase Desa Siaga Aktif	
3	Bidang UED	3.1. Persentase Bumdes Berkembang 3.2. Persentase Desa Maju dan Berkembang 3.3. Indeks Desa Membangun	
4	Bidang TTG	4.1 Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri	
5	Bidang PEMDES	4.1. Realisasi APBDes	
6	Sekretaris	5.1. Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya diupdate	
7	Kepala Dinas	6.1. Final Reviu, Indikator Capaian dan penyebab target tidak tercapai	

Ba'a, 17 Januari 2025

**PIHAK PERTAMA**

Plt. Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Rote Ndao



**Pauwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai  
Jl.Lekunik Telepon/Faximile (0380) 871022 Ba'a  
Website : rotendaokab.go.id

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN ROTE NDAO**

**TAHUN ANGGARAN : 2024**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Masyarakat	1.1. Indeks Desa Membangun	0,65
2	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.1 Persentase Desa maju dan Berkembang	74,50%
		2.2 Realisasi APBDes	100%
		2.3 Persentase Bumdes berkembang	20.95%

Baa 11 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas PMD

Kabupaten Rote Ndao

**Pauwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah

Nama : Pauwil J.J.Nggili, S.Sos. M.Si

Jabatan : Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Rote Ndao

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Oder Maks Sombu, SH, MA, MH

Jabatan : Penjabat Bupati Rote Ndao

Selaku atasan langsung **PIHAK SATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 11 Desember 2024

### PIHAK KEDUA

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,



**ODER MAKS SOMBU, SH, MA, MH**

### PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN ROTE NDAO



**PAUWIL J.J.NGGILI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 198107252006041018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Masyarakat		Indeks Desa Membangunan	Poin	0,65
2		Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase desa maju dan berkembang 2. Realisasi APBDes 3. Persentase Bumdes berkembang	% % %	74,50 100 28,57
NO	PROGRAM		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	Administrasi Pemerintahan Desa		Rp. 130.000.000,-	DAU	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Rp. 388.094.000,-	DAU	
3	Penataan Desa		Rp. 119.000.000,-	DAU	
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 2.297.620.230,-	DAU	
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.934.714.234,-</b>		

Ba'a, 11 Desember 2024

**PIHAK KEDUA**

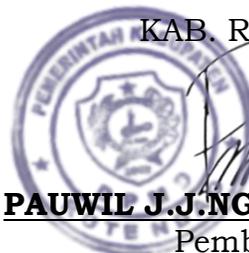
PENJABAT BUPATI ROTE NDAO



**ODEK MAKS SOMBU, SH, MA, MH**

**PIHAK KESATU**

Plt KEPALA DPMD  
KAB. ROTE NDAO



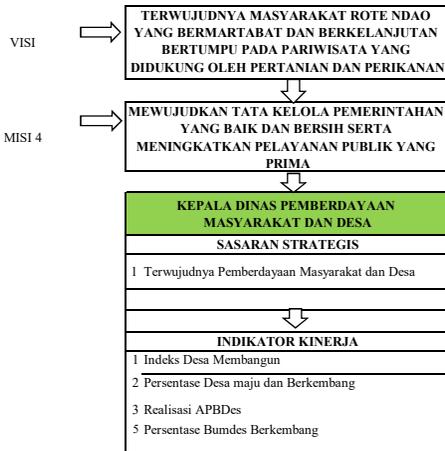
**PAUWIL J.J.NGGILI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 198107252006041018



SATUAN DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN ROTE NDAO  
POHON KINERJA TAHUN 2024



<b>SEKRETARIS</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Persentase Pelayanan surat menyurat yang terselesaikan
Jumlah Laporan (LAKIP, LKPJ, LPPD, Renja, Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terselesaikan
Jumlah DPA, RKA, DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikoreksi dan disempurnakan
Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikoreksi dan disempurnakan
Jumlah (Anjab, ABK, SOP, SPP dan Peta Jabatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terselesaikan
Persentase Evaluasi Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset terhadap Atasan

<b>KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatkan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Persentase Pelayanan surat menyurat yang terselesaikan
Jumlah (Anjab, ABK, SOP, SPP dan Peta Jabatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

<b>KASUBAG KEUANGAN, ASET, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatkan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikoreksi dan disempurnakan
2. Persentase Evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset terhadap Atasan

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatkan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Jumlah Laporan (LAKIP, LKPJ, LPPD, Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terselesaikan
2. Jumlah DPA, RKA, DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikoreksi dan disempurnakan

<b>KEPALA BIDANG PMPD</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif
2. Persentase Posyandu Aktif
3. Persentase Desa Siaga Aktif

<b>KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI DESA &amp; PKP</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Persentase Bumdes Berkembang
2. Persentase Desa Maju dan Berkembang

<b>KEPALA BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri

<b>KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA DAN</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Transparansi responsibilitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Indeks Desa Membangun
2. Realisasi APBDes

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENINGKATAN MOTIVASI MASYARAKAT DAN GOTONG ROYONG</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Terlaksananya Lomba Desa dan Pokjanal Posyandu
2. Terlaksananya koordinasi mendampingi memantau pelaksanaan program kegiatan dan mengelola administrasi kegiatan yang di fasilitasi oleh Tim Penggerak PKK

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa (Lomba Desa/Kelurahan (P3MD-PID)
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENDAYAGUNAAN SDA &amp; TTG</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENATAAN, ADMINISTRASI PEMDES &amp; PKP</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif
2. Persentase Posyandu Aktif
3. Persentase Desa Siaga Aktif

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN BUMDES DAN PERDAGANGAN DESA</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Persentase Bumdes Berkembang

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Pelatihan Pemasangan Pompa Hydrant

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN &amp; ASET DESA</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PELAYANAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Persentase Desa Siaga Aktif

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI USAHA EKONOMI DESA DAN PERMODALAN DESA</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Persentase Desa Maju dan Berkembang

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1

<b>SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KERJASAMA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>

Plt Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Rote Ndao  
  
**Pauwli J. J. Nggili, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 198107252006041018



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA													
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024													
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab	
								I	II	III	IV		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa		1.1. Indeks Desa Membangun	0,65 poin	1. Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintah	Rp. 637,094,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang UED	
2		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.1. Persentase Desa Maju dan Berkembang	74,50 %	Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat							Bidang Ued	
			2.2. Realisasi APBDes	100 %									Bidang Pemdes
2			2.3. Persentase Bumdes Berkembang	28,57 %					√	√	√	√	Bidang UED
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2		Rp. 2,297,620,234	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Sekretariat
<p>Ba'a Januari 2025  Plt Kepala Dinas PMD  Kabupaten Rote Ndao</p>  <p>P. Dwi J. J. Nggili, S.Sos, M.Si  NIP. 1981072520060410118</p>													

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA														
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024														
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab	
									I	II	III	IV		
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa		1.1.	Indeks Desa Membangun	0,65	poin	1. Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintah	Rp. 637,094,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang UED
2		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.1	Persentase Desa Maju dan Berkembang	74,50	%	Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat							Bidang Ued
			2.2	Realisasi APBDes	100	%								Bidang Pempdes
2			2.3	Persentase Bumdes Berkembang	28,57	%					√	√	√	√
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2	Rp. 2,297,620,234	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Sekretariat

Ba'a Januari 2025  
 Plt Kepala Dinas PMD  
 Kabupaten Rote Ndao



P. Dwi J. J. Nggili, S.Sos, M.Si  
 NIP. 1981072520060410118

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Permasalahan / Isu Strategis	Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Formula Pengukuran	Satuan	Unit Kerja/Bidang	Keterangan	
1	2	3	4	5	6		7	12	13	
1	Kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa, Program Administrasi desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Administrasi Pemerintahan Desa	<b>Indikator terhadap Program, Keg dan Sub</b>	IDM (Indeks Desa Membangun), IS (Indes Sosial) IEK (Indeks Ekonomi), IL (Indeks Lingkungan)	$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$	%	Bidang PEMDES dan UED		
2	Kondisi SDM Pemerintah desa yang belum memadai serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih relatif rendah	Sasaran : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah Desa Maju dan Desa Berkembang	$Jumlah\ Desa\ Maju + Desa\ Berkembang / Total\ Desa \times 100$				
3	Kurangnya Koordinasi dari desa ke tingkat kabupaten				Realisasi APBDes	$Realisasi\ APBDes / Total\ APBDes \times 100$	%			
4	Terjadi perubahan aturan dan regulasi yang selalu berubah ubah							Bidang UED		
5	Pembangunan usaha ekonomi keluarga, dan kelompok masyarakat dan skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDES yang rendah				Jumlah Bumdes	$Jumlah\ Bumdes\ Berkembang / Total\ Bumdes \times 100$	%			
							%			

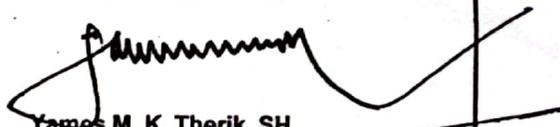
Baa, Januari 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa



**Yames M. R. Thderik, SH**  
Nip: 19800429 1999031001



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
SEKRETARIAT

Nomor SOP - AP	DPMD. 065 / 21 / XII / KAB.RN / 2019
Tanggal Pengesahan	Desember 2019
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao
	 James M. K. Therik, SH NIP. 19800429 199903 1 001
Nama SOP - AP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;</li><li>2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Minimal SMA / SMK</li><li>2. Memahami Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>3. Memahami Tata Naskah Dinas</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penanganan Surat Masuk</li><li>2. SOP Penanganan Surat Keluar</li><li>3. SOP Rencana Kerja (RKT)</li><li>4. SOP Perjanjian Kinerja Tahunan (PK)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. ATK</li><li>3. Jaringan Internet</li><li>4. Lembar kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Realisasi Keuangan</li></ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila Penyusunan LKIP tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada ketidaktepatan Waktu Penyampaian LKIP dan Kualitas Data / Informasi Dalam LKIP yang Tidak Valid	Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan kepada Sekretaris untuk mempersiapkan konsep LKIP					Agenda Kerja	10 Menit	Disposisi	
2.	Menugaskan kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk menyusun konsep LKIP					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3.	Memerintahkan Pengadministrasi Perencanaan dan Program untuk mengumpulkan bahan LKIP					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4.	Mengumpulkan dan menyerahkan data kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan					Disposisi	1 jam	Data, Bahan Laporan	
5.	Menyusun konsep LKIP dan meneruskan kepada Sekretaris untuk memeriksa					Data, Bahan Laporan	1 Hari	Konsep Laporan	
6.	Menelaah draf LKIP jika setuju di paraf dan jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Konsep Laporan	15 Menit	Draf Laporan	
7.	Menandatangani LKIP dan meneruskan kepada Pengadministrasi Perencanaan dan Pelaporan untuk					Draf Laporan	10 Menit	Laporan	
8.	Mengagendakan, mengandakan, mengarsipkan dan Mendistribusi					Laporan	10 Menit	Laporan	



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai  
Jl.Lekunik Telepon/Faximile (0380) 8571028 Ba'a  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR : 1/KEP/PAN-LKIP/DPMD/2025**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-531-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Tahun 2024 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ndao Tahun 2023.

2. KETUA

Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023;

3. SEKRETARIS

a. Mengkoordinasikan secara langsung Anggota dan Staf Sekretariat; dan

b. Bertanggung jawab terhadap semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 secara administratif.

4. ANGGOTA

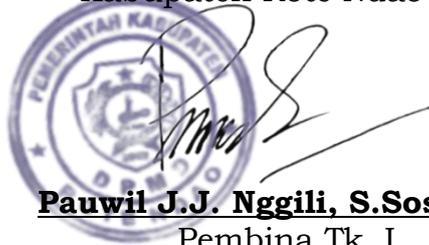
Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023;

KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 16 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Rote Ndao



**Pauwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018

Tembusan :

1. PJ Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Tim pelaksana masing-masing di tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 1 /KEP/PAN-LKIP/DPMD/2025**  
**TANGGAL : 16 JANUARI 2025**  
**TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024**

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pauwil J.J.Nggili, S.Sos, M.Si	Penanggung Jawab
2.	Leri A. Z. Rotte, SH	Ketua
3.	Apriliyani Manubulu, SE	Sekretaris
5.	Wendie Y.M. Eoh Ndolu, ST	Anggota
6.	Yakoba Marlein Lenggu, SE	Anggota
9.	Indriyati T. Therik, SE	Anggota
10.	Maxs D. Langga, A.Md, Par	Anggota

Plt. Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Rote Ndao,



**Pauwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018